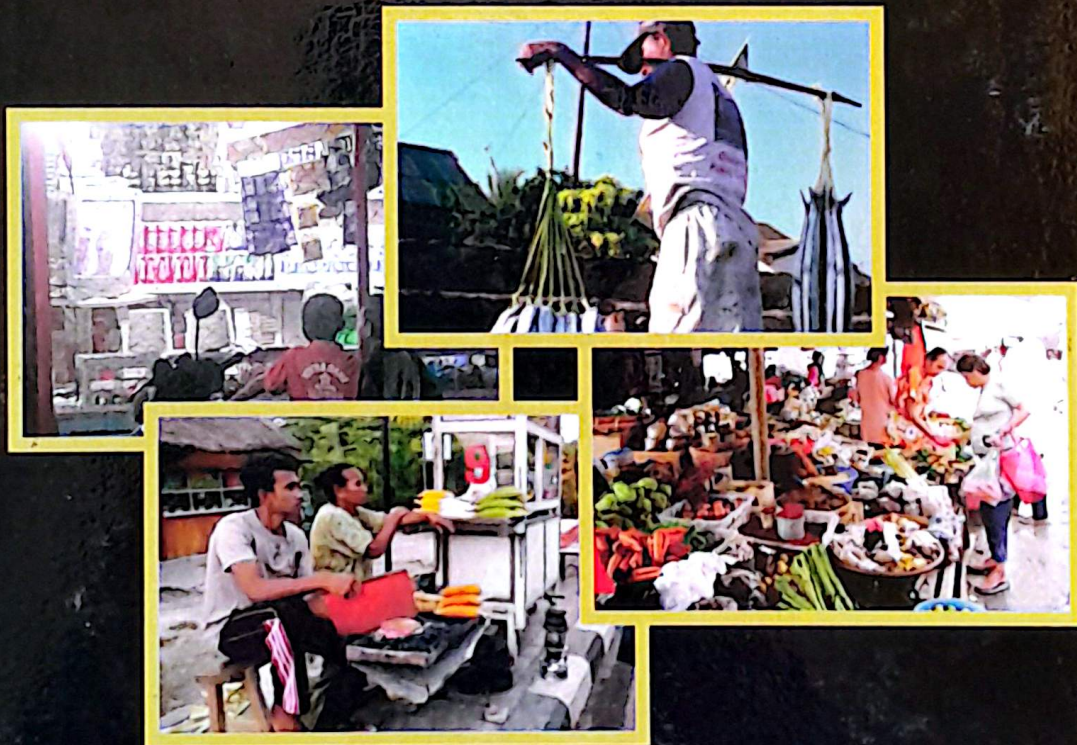




LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**KAJIAN TENTANG
PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN 2015**

RINGKASAN (SUMMARY)

OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BAGI KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA KUPANG

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang, didasarkan pada keprihatinan, bahwa terdapat cukup banyak warga Kota Kupang yang menjalankan usaha berskala mikro dan kecil, namun memiliki kemampuan modal yang terbatas, dan sulit mengakses lembaga keuangan formal yang ada. Karena itu, Pemerintah Kota Kupang menetapkan program ini sebagai bagian penting dari upaya untuk membantu warga masyarakat sebagai pelaku ekonomi berskala mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha, sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilakukan dalam wujud penyaluran dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) pada setiap kelurahan. Selanjutnya, LPM menyalurkan kepada warga masyarakat dalam bentuk bantuan permodalan, yang harus dikembalikan untuk digulirkan kepada penerima berikutnya. Penyaluran dana hibah kepada LPM tersebut telah dilakukan pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000 dan tahun 2015 sebesar 10.500.000.000.-

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang telah disalurkan tersebut perlu dikaji dampaknya, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka optimalisasi pemanfaatannya bagi kemajuan ekonomi warga Kota Kupang. Untuk kepentingan ini, kajian difokuskan pada dana PEM yang telah disalurkan pada tahun 2013. Total individu yang menerima bantuan permodalan melalui LPM setiap kelurahan sebanyak 3.888 dan yang dianalisis sebagai sampel sebanyak 306 penerima bantuan (7,89%). Beberapa temuan pokok dari hasil analisis yang patut diketengahkan adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Dana PEM Tahun 2013

- a) Dana PEM yang dialokasi sebesar Rp. 15.000.000.000, telah disalurkan sebesar Rp. 14.697.000.000 untuk 3.888 penerima pada 51 kelurahan. Dari hasil pengembaliannya, telah dilakukan perguliran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 9.311.800.000, sehingga total dana yang disalurkan kepada masyarakat berupa penyaluran awal dan tiga kali perguliran sebesar Rp. 24.008.800.000; sementara itu, jumlah penerima juga meningkat menjadi 5.647 atau bertambah sebanyak 1.759 penerima (45,24%).

-
- b) Tingkat pengembalian pada tahap awal cukup baik, yaitu 88,03%, tetapi pada perguliran I, II dan III menunjukkan gejala penurunan. Secara keseluruhan, tingkat pengembalian penyaluran awal dan perguliran (I – III) sebesar 61,12%. Gejala penurunan ini dapat terjadi, mungkin disebabkan perguliran I, II dan III belum memasuki saat jatuh tempo, sehingga para penerima pinjaman sedang dalam proses pengembalian.

2. Profil Responden Penerima Dana PEM

- a) Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi berada pada usia produktif dan berpendidikan cukup memadai.
- b) Sebagian besar responden memilih usaha dagang dan jasa.
- c) Sebagian besar responden menerima bantuan pada kategori Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000.-
- d) Pada umumnya tingkat pengembalian cukup baik. Responden yang telah melunasi kewajibannya sebanyak 62,09%

3. Profil Pengelolaan Usaha Responden Penerima Dana PEM

- a) Sebagian besar responden memilih jenis usaha atas inisiatif sendiri, dengan pertimbangan utama mudah dikerjakan dan sesuai keahlian/pengalaman.
- b) Sebagian besar responden memiliki tempat usaha dengan status milik sendiri.
- c) Sebagian besar responden mengelola sendiri usahanya; responden yang menggunakan tenaga kerja relatif sedikit.
- d) Waktu yang digunakan responden untuk berusaha relatif pendek; sekitar 44,44% responden bekerja antara 1 – 6 jam per hari.
- e) Pada umumnya responden menjual secara tunai, hanya sebagian kecil responden dengan modal yang relatif besar yang menggunakan penjualan tunai dan kredit.
- f) Pencatatan usaha belum dilakukan secara tertib dan teratur oleh responden.
- g) Sebagian besar responden belum menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil transaksi setiap hari/minggu.
- h) Sebagian besar responden tidak melakukan perhitungan selisih transaksi setiap harinya.
- i) Sebagian besar responden tidak tertib dalam memisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha.

4. Kinerja Usaha Responden Penerima Dana PEM

- a) Rata-rata skala usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan diatas Rp. 10.000.000.-
- b) Rata-rata persediaan usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan di atas Rp. 10.000.000.-
- c) Rata-rata piutang usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan diatas Rp. 10.000.000.-

5. Pendapatan Bersih Responden Penerima Dana PEM

- a) Rata-rata omzet penjualan responden meningkat, berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan; dengan rata-rata pendapatan bersih Rp. 7.751.961. Namun perlu dicatat bahwa kontribusi terbesar terhadap keuntungan rata-rata diberikan oleh responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.-
- b) Sebagian besar responden menggunakan pendapatan bersihnya untuk konsumsi (65,84%); dan 34,16% digunakan untuk menambah modal.
- c) Pada umumnya responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.- menggunakan presentase pendapatan bersih usaha yang lebih besar untuk menambah modal.

6. Permasalahan

a) Pilihan Jenis Usaha

Sebagian besar responden memilih usaha dagang; sementara jenis usaha lainnya yang berbasis ketrampilan khusus dengan nilai tambah yang relatif besar masih terbatas. Bila kecenderungan memilih jenis usaha dagang terus berlanjut, pada akhirnya akan menimbulkan penumpukan usaha yang berdampak pada penurunan omzet penjualan.

b) Tempat Usaha

Sebagian besar responden menggunakan rumah atau pekarangan sebagai tempat usaha. Pilihan ini sesuai dengan kemampuan responden, tetapi kurang memperhitungkan keberadaan pembeli. Dalam jangka menengah dan panjang, akan menimbulkan permasalahan terkait aspek lingkungan dan penataan ruang. Permasalahannya adalah: (1) responden tidak memiliki alternatif tempat usaha yang dapat dijangkau dengan kemampuan mereka; (2) ruang serta sarana dan prasarana untuk menampung aktivitas usaha bagi mereka juga belum tersedia secara memadai.

c) Pelaksanaan Usaha

Sebagian besar responden mengerjakan usahanya sendiri (tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggunakan tenaga kerja). Kondisi demikian mengharuskan responden harus menyiapkan semua hal berkaitan dengan usahanya, akibatnya waktu menjalankan usaha realtif terbatas. Masih terdapat proporsi responden yang cukup besar dengan waktu kerjanya belum optimal, yaitu antara 1 – 6 jam dalam satu hari.

d) Penatausahaan Keuangan

Pada umumnya responden belum mempraktikan penatausahaan keuangan dengan baik, yaitu: tidak melakukan pencatatan usaha secara teratur, tidak melakukan perhitungan rugi/laba secara teratur dan belum melakukan pemisahan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan usaha. Praktik penatausahaan keuangan seperti ini menyebabkan pengendalian usaha tidak dapat dilakukan dengan baik dan rawan terhadap praktik salah urus.

e) Jangka Waktu Pengembalian Bantuan

Waktu pengembalian bantuan selama 12 kali cicilan (1 tahun) dirasakan cukup berat, karena beban pengembalian (cicilan) relatif besar.

f) Pengembangan Usaha

- Pengembangan usaha yang dimaksud dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu peningkatan skala usaha (ekspansi usaha) dan diversifikasi usaha. Permasalahan yang mereka hadapi adalah: (1) penguasaan kemampuan teknis untuk melakukan diversifikasi usaha, (2) kemampuan manajerial yang belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha, serta (3) akumulasi modal yang terjadi belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha.
- Para penerima bantuan kurang dari Rp. 5.000.000.- tampaknya mengalami kesulitan untuk melakukan akumulasi modal, sehingga setelah masa pelunasan, mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya.
- Masing-masing mengelola usahanya secara parsial dan terpisah, mengakibatkan tidak terdapat sinergi usaha dikalangan penerima bantuan dana PEM.
- Munculnya berbagai outlet pemasaran besar di Kota Kupang seperti Hypermart, Lipo Plaza dan Ramayana, belum bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang dihasilkan para penerima bantuan permodalan, karena pilihan jenis usaha mereka tidak mendukung.

7. Rekomendasi

a) Tahap Perencanaan

- Diluar usaha dagang, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu mengkaji untuk mengidentifikasi usaha-usaha produktif berbasis ketrampilan tertentu yang dari sisi penawaran masih tersedia pangsa yang relatif besar dan memiliki nilai tambah tinggi, sebagai alternatif bagi pengembangan usaha para penerima bantuan dana PEM.
- Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar batas bantuan modal minimum adalah Rp. 5.000.000. Dengan tingkat perputaran sebesar 3 (tiga) kali, omzet penjualan akan mencapai minimum Rp.15.000.000.- per bulan, sehingga terdapat margin keuntungan yang cukup untuk ditabung (menambah modal).
- Bagi calon penerima pertama (baru) dari penyaluran bantuan awal maupun perguliran, perlu dikembangkan semacam *capacity building* bagi calon penerima bantuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan pengelolaan usaha yang didasarkan pada proporsal usaha yang diajukan.

b) Tahap Pelaksanaan

- Diperlukan koodinasi lintas SKPD agar dapat ditetapkan lokasi tempat usaha yang terkonsentrasi (pada aras kelurahan atau kecamatan) dan penyediaan infrastruktur yang memadai, agar penambahan jumlah penerima bantuan dapat memperoleh tempat usaha yang sesuai kemampuan dan memadai untuk pelaksanaan usahanya.
- Bagi penerima bantuan dengan kategori jumlah modal dan omzet penjualan kurang dari Rp. 15.000.000, pilihan melaksanakan pekerjaan sendiri cukup efisien dari segi pembiayaan, tetapi pemanfaatan waktu kerja belum optimal. Disarankan agar waktu kerja yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Bagi penerima bantuan dengan kategori modal usaha dan omzet penjualan di atas Rp.15.000.000 yang tidak menggunakan tenaga kerja, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tenaga kerja untuk menjamin keteraturan dan keberlanjutan kegiatan usaha serta meningkatkan omzet penjualan.

c) Penatausahaan Keuangan

- Penatausahaan kegiatan para penerima bantuan, utamanya pencatatan dan pelaporan transaksi serta pemisahan pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi

dan usaha perlu mendapat perbaikan. Dalam kaitan ini, proses pendampingan untuk perbaikan praktik penatausahaan keuangan, terutama oleh fasilitator keluarahan menjadi sangat penting.

- Dalam kaitan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melaksanakan *capacity building* bagi fasilitator kelurahan, agar efektif dalam melaksanakan pendampingan.

d) Waktu Pengembalian Bantuan

Batas pengembalian bantuan selama 12 kali cicilan (1 tahun) dirasakan relatif berat bagi para penerima bantuan, karena itu disarankan agar batas pengembalian bantuan modal diperpanjang menjadi 20 kali cicilan (20 bulan), agar beban cicilan menjadi lebih ringan.

e) Pengembangan Usaha

- Responden pada kategori jumlah modal kurang dari Rp. 15.000.000 masih menghadapi kendala untuk melakukan akumulasi kapital pasca pelunasan. Kepada mereka disarankan agar dapat memperoleh pembiayaan lanjutan, terutama melalui perguliran untuk peningkatan modal usaha dan skala usaha.
- Bagi responden dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 15.000.000, disarankan untuk melakukan diversifikasi usaha untuk percepatan pengembangan usaha, baik melalui pembiayaan lanjutan (melalui perguliran) maupun pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial.
- Untuk kepentingan ini, Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli perlu melakukan kajian untuk memastikan penerima bantuan yang memiliki prospek usaha baik dan patut mendapatkan pembiayaan lanjutan, baik untuk peningkatan skala usaha maupun diversifikasi usaha.
- Para penerima bantuan melalui dana PEM dalam kenyataannya melaksanakan usaha secara individual, sehingga tidak terdapat sinergi antar pelaku usaha. Ke depan, perlu dikembangkan model pengembangan usaha yang dapat menciptakan keterkaitan usaha diantara para penerima bantuan. Untuk itu disarankan agar model pengembangan usaha dengan pola klaster bisnis atau klaster bisnis perlu diadopsi.
- Pengembangan usaha dengan klaster bisnis atau klaster industri pada dasarnya membagi pelaku ekonomi pada 3 (tiga) segmen dalam matrantai usaha, yaitu

pada segmen pemasok (bahan mentah dan setengah jadi), produsen (penghasil) dan penjual. Pola ini perlu dibakukan dalam Petunjuk Pelaksanaan, sehingga menjadi rujukan bagi Pengelola Dana PEM, Tim Teknis dan Tim Ahli dalam menyiapkan dan mengembangkan usaha para penerima dana PEM.